

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1991 terjadi perubahan sistem politik global dari bipolar menjadi multipolar. Ketika sistem internasional bersifat bipolar, dunia didominasi oleh 2 kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara saling memperebutkan kekuasaan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan teknologi. Tetapi pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin, sistem internasional berubah menjadi multipolar dimana kekuasaan dipegang oleh banyak negara. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada negara-negara Asia untuk terlibat secara signifikan di kancah internasional. Kekuasaan yang semula didominasi oleh negara dunia Barat mulai bergeser ke negara dunia Timur. Tiongkok merupakan salah satu negara Asia yang menunjukkan perkembangan signifikan pasca perang dingin. Kebijakan luar negeri Tiongkok yang semula tertutup terhadap dunia luar menjadi lebih terbuka sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Chen, 1993).

Tahun 1970 Tiongkok mengalami keterpurukan ekonomi akibat gagalnya kebijakan *Great Leap Forward* yang diinisiasi oleh Mao Zedong. Perekonomian yang lemah ditambah kerentanan militer dan keterbelakangan teknologi menyebabkan Tiongkok mengalami kerentanan strategis. Melihat hal ini, Deng Xiaoping sebagai pemimpin utama CCP melakukan restrukturisasi ekonomi berupa reformasi pasar yang berorientasi internasional (Garnaut, 2018). Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah *Open Door Policy* yang mengubah sistem ekonomi

Tiongkok dari sosialisme menjadi kapitalisme. Akan tetapi, implementasi kapitalisme ekonomi tetap diimbangi dengan kontrol politik yang kuat dari CCP. Sistem ekonomi semacam ini kemudian dikenal dengan istilah *Social Market Economy* dimana perusahaan-perusahaan bersifat independen secara hukum tetapi berdampingan dengan infrastruktur politik komunis. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan perekonomian Tiongkok sehingga pada tahun 2011 Tiongkok muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (Berger, Choi, & Herstein, 2013).

Seiring dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, Tiongkok membutuhkan jangkauan pasar yang lebih luas sehingga Tiongkok berusaha memperluas pengaruhnya ke berbagai kawasan. Pada tahun 1980-an, Tiongkok mulai memperluas pengaruhnya ke Timur Tengah. Meskipun merupakan kawasan rawan konflik, tetapi Tiongkok melihat Timur Tengah sebagai kawasan yang strategis untuk memenuhi kepentingannya. Awalnya Tiongkok menganggap Timur Tengah sebagai wilayah pinggiran yang tidak signifikan tetapi seiring dengan meningkatnya kepentingan di kawasan tersebut, Timur Tengah menjadi kawasan yang semakin penting bagi Tiongkok (Scobell & Nader, 2016). Maka dari itu, selama beberapa dekade terakhir Tiongkok sering terlibat dalam aktivitas penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi keterlibatan Tiongkok dinilai tidak signifikan karena terhalang oleh prinsip non-intervensi yang membatasi Tiongkok untuk tidak terlalu mencampuri urusan domestik negara lain (Sun & Zoubir, 2018).

Pada 10 Maret 2023, Tiongkok memfasilitasi mediasi konflik antara Arab Saudi dan Iran. Mediasi tersebut berhasil memulihkan hubungan diplomatik kedua negara yang telah terputus sejak tahun 2016. Arab Saudi dan Iran awalnya memiliki hubungan yang cukup baik, terutama pada masa kepemimpinan Raja Faisal dan Reza Shah. Kedua negara bahkan menandatangani perjanjian kerjasama untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, pasca meletusnya Revolusi Islam Iran tahun 1979 hubungan kedua negara mulai memburuk. Revolusi tersebut berhasil menggulingkan rezim Reza Shah yang dianggap pro barat dan mendirikan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan besar di sektor politik Iran. Di bawah pemerintahan Khomeini, Iran mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih agresif guna meningkatkan posisinya di tingkat regional dan internasional. Arab Saudi melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap dominasinya di kawasan Timur Tengah (Daud, Othman, & Idris, 2018).

Arab Saudi dan Iran merupakan kekuatan regional utama di Timur Tengah. Arab Saudi memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan sedangkan Iran memiliki pengaruh ekonomi dan militer yang tidak dapat diremehkan. Maka dari itu, kedua negara saling bersaing untuk mendominasi kawasan dan menjadi pemimpin negara-negara Arab. Meskipun tidak pernah berkonflik secara langsung, tetapi persaingan antara Arab Saudi dan Iran terlihat jelas dalam konflik-konflik yang terjadi di negara lain seperti Irak, Suriah, dan Yaman (Zorri, 2023). Selama 20 tahun terakhir, hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Iran telah mengalami banyak pasang surut. Pada tahun 1988 kedua negara

memutuskan hubungan diplomatik pasca insiden yang menewaskan 275 jemaah haji Iran. Hubungan kedua negara mulai membaik pada tahun 1999 karena Mohammad Khatami yang memiliki kedekatan hubungan dengan Raja Fahd terpilih menjadi Presiden Iran (McDowall, 2016).

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran kembali terputus pada tahun 2016 akibat eksekusi mati seorang ulama besar Syiah bernama Nimr al-Nimr. Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati kepada Nimr karena telah menginisiasi kekerasan dan menggiring opini anti pemerintah. Eksekusi mati terhadap Nimr memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di berbagai negara, terutama Iran sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam Syiah (Isik, 2023). Dalam aksi demonstrasi tersebut, ratusan demonstran membakar kantor perwakilan diplomatik Arab Saudi yang berada di Teheran dan kantor konsulat Arab Saudi yang berada di Masyhad. Arab Saudi segera menarik para diplomatnya dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran segera setelah terjadinya demonstrasi (United States Institute of Peace, 2023). Sejak saat itu, hubungan antara Arab Saudi dan Iran semakin memburuk. Pada tahun 2019 Iran melalui milisi Houthi melancarkan serangan ke Saudi Aramco selaku perusahaan penghasil minyak terbesar milik Arab Saudi (Shine, Guzansky, & Shavit, 2023).

Konflik antara Arab Saudi dan Iran telah menyebabkan ketidakstabilan kawasan sehingga mendorong beberapa negara di kawasan untuk memfasilitasi mediasi antara kedua negara. Selama tahun 2021-2022, terdapat beberapa upaya mediasi yang difasilitasi oleh Irak dan Oman. Mediasi tersebut berhasil membawa

perwakilan Arab Saudi dan Iran untuk melakukan pembicaraan dan menandatangani nota kesepahaman. Akan tetapi, pembicaraan tersebut menemui jalan buntu dan pemulihan hubungan baru bisa dicapai melalui mediasi yang difasilitasi Tiongkok pada tahun 2023 (United States Institute of Peace, 2023).

Pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran merupakan pencapaian yang signifikan bagi Tiongkok karena keterlibatannya dalam aktivitas penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah selama ini dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Maka dari itu, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai keterlibatan Tiongkok dalam mediasi konflik antara Arab Saudi dan Iran. Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yaitu menganalisis mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran menggunakan teori diplomasi kuasi-mediasi. Penelitian yang menggunakan teori diplomasi kuasi-mediasi masih jarang ditemukan sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru di bidang diplomasi dan resolusi konflik. Saat ini Tiongkok semakin aktif terlibat dalam aktivitas penyelesaian konflik sehingga penelitian ini penting untuk menganalisis potensi peningkatan keterlibatan Tiongkok dalam aktivitas penyelesaian konflik di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediasi dalam konflik Arab Saudi dan Iran?
2. Bagaimana tingkat diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor pendorong dan tingkat diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediasi dalam konflik Arab Saudi dan Iran.
2. Menganalisis sejauh mana tingkat diplomasi kuasi-mediasi yang dilakukan Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru di bidang hubungan internasional khususnya mengenai diplomasi dan resolusi konflik serta diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki pembahasan serupa yaitu diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. *State of the Art*

Degang Sun & Yahia Zoubir dalam penelitiannya yang berjudul “*China’s Participation in Conflict Resolution in the Middle East and North Africa: A Case of Quasi-Mediation Diplomacy?*” menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan Tiongkok di kawasan MENA merupakan mediasi semu atau mediasi yang tidak sungguh-sungguh. Diplomasi kuasi-mediasi merupakan pendekatan hati-hati dimana pihak ketiga bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas mediasi tetapi berusaha menahan diri untuk tidak memainkan peran yang signifikan. Terdapat 4 faktor pendorong Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediasi di kawasan MENA yaitu relevansi kepentingan komersial, jangkauan pengaruh terhadap pihak yang berkonflik, konsensus kekuatan besar, dan tingkat kesulitan penyelesaian konflik. Selain itu, Sun dan Zoubir mengklasifikasikan diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok di kawasan MENA menjadi 4 tingkat yaitu intervensi multifaset, keterlibatan proaktif, interseksi terbatas, dan partisipasi tidak langsung (Sun & Zoubir, 2018). Sun dan Zoubir lebih banyak memberikan penjelasan tentang diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok di kawasan MENA sedangkan penelitian ini memberikan analisis menggunakan studi kasus yang lebih spesifik yaitu diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

Dan Wang dalam penelitiannya yang berjudul “*China’s Role in the Syrian Conflict – A Cautious Quasi-Mediator*” berargumen bahwa Tiongkok melakukan mediasi interseksi terbatas dalam konflik Suriah. Meskipun Tiongkok mengklaim dirinya sebagai mediator yang obyektif, bertanggung jawab, dan tidak memihak

tetapi dalam implementasinya Tiongkok hanya memberikan sedikit sumber daya diplomatik. Keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah dianggap tidak signifikan karena hanya mengirimkan pejabat tingkat rendah dan berpartisipasi secara terbatas dalam mediasi yang dipimpin oleh negara lain. Rendahnya keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah disebabkan oleh terbatasnya kepentingan, tidak adanya pengaruh yang cukup terhadap pihak yang berkonflik, dan kurangnya pengetahuan Tiongkok untuk menyelesaikan konflik Suriah. Wang berargumen bahwa terdapat kontradiksi antara retorika dan realita sehingga Tiongkok bukan merupakan kekuatan besar yang bertanggung jawab melainkan kekuatan besar yang mementingkan diri sendiri (Wang, 2023). Penelitian ini berusaha memberikan analisis mengenai diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok melalui studi kasus yang berbeda. Apabila Wang menganalisis diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Suriah maka penelitian ini menganalisis diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

Andrew Scobell dan Alireza Nader dalam penelitiannya yang berjudul *“China in the Middle East - The Wary Dragon”* menjelaskan keterlibatan Tiongkok di Timur Tengah dari segi ekonomi, politik, dan keamanan. Penelitian ini membahas hubungan Tiongkok dengan Arab Saudi dan Iran serta implikasinya terhadap Amerika Serikat. Scobell dan Nader berargumen bahwa peningkatan minat dan keterlibatan Tiongkok di Timur Tengah dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan energi Tiongkok. Meskipun terdapat anggapan bahwa peningkatan keterlibatan Tiongkok merupakan upaya untuk menyeimbangkan kekuatan dengan AS, tetapi hal ini bukanlah penyebab utama. Tiongkok

diibaratkan sebagai naga yang waspada karena berusaha meningkatkan hubungan ekonomi tetapi pada saat yang bersamaan juga membatasi hubungan militernya dengan negara-negara di kawasan. Penelitian ini berargumen bahwa Tiongkok berusaha melindungi kepentingan nasionalnya yang semakin besar di Timur Tengah tetapi menghindari keberpihakan dalam konflik yang terjadi di kawasan tersebut (Scobell & Nader, 2016). Meskipun memiliki subjek pembahasan yang sama yaitu Tiongkok, Arab Saudi, dan Iran tetapi penelitian ini berusaha memberikan analisis yang lebih spesifik yaitu diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

Jonathan Fulton dalam penelitiannya yang berjudul “*China’s Emergence as a Middle East Power*” berargumen bahwa saat ini Tiongkok telah muncul sebagai salah satu aktor penting di kawasan Timur Tengah. Peningkatan hubungan Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah disebabkan oleh pelaksanaan inisiatif BRI. Pada tahun 2013, Tiongkok memperkenalkan BRI sebagai inisiatif pembangunan infrastruktur yang bertujuan mewujudkan konektivitas kawasan Eurasia dan melancarkan perdagangan internasional. Melalui BRI, Tiongkok memberikan investasi terhadap berbagai proyek di Timur Tengah sehingga meningkatkan pengaruh Tiongkok terhadap negara-negara di kawasan tersebut (Fulton, 2021). Apabila Fulton menjelaskan hubungan Tiongkok dengan negara-negara Timur Tengah dari lanskap BRI, maka penelitian ini berusaha memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan Tiongkok dengan Arab Saudi dan Iran melalui lanskap ekonomi dan politik.

Yeghia Sarkis Tashjian dalam penelitiannya yang berjudul “*Waving between Energy Security and Geopolitics: China’s Pro-Active Diplomacy, Iran, and the Persian Gulf*” menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok di Timur Tengah dipengaruhi oleh peningkatan ketergantungan Tiongkok terhadap sumber daya energi yang dimiliki kawasan tersebut. Tiongkok terpaksa mengambil peran keamanan yang lebih besar untuk melindungi kepentingan geopolitik dan keamanan energinya di Iran. Hal ini kemudian menjelaskan mengapa Tiongkok terlibat secara proaktif dalam penyelesaian isu nuklir Iran (Tashjian, 2020). Dalam penelitiannya, Tashjian lebih banyak membahas hubungan Tiongkok dan Iran sedangkan penelitian ini berusaha memberikan analisis yang seimbang antara hubungan Tiongkok dan Iran serta hubungan Tiongkok dan Arab Saudi.

Cheng Jason Qian dalam penelitiannya yang berjudul “*The Culture of China’s Mediation in Regional and International Affairs*” menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan minat dan permintaan agar Tiongkok semakin aktif terlibat dalam aktivitas penyelesaian konflik di tingkat regional dan internasional. Penelitian ini berargumen bahwa Tiongkok memiliki gaya mediasi yang unik karena lebih berorientasi pada apa yang bisa dikerjakan dan apa yang tidak bisa dikerjakan, bukan pada proses yang benar atau salah. Dalam melakukan mediasi, Tiongkok dapat berperan sebagai mediator utama atau mediator pendukung. Hal ini disesuaikan dengan kasus yang dihadapi karena setiap kasus memiliki keunikan tersendiri. Selain mediasi, Tiongkok memiliki strategi alternatif untuk menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain mempromosikan

pembangunan ekonomi, menciptakan keamanan regional, dan saling membangun kepercayaan (Qian, 2010). Apabila Qian lebih banyak memberikan penjelasan mengenai karakteristik mediasi yang dilakukan Tiongkok secara umum, maka penelitian ini berusaha memberikan analisis dengan studi kasus yang spesifik yaitu diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

1.5.2. Kerangka Teori

Diplomasi merupakan aktivitas komunikasi, negosiasi, atau mediasi yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Negara melakukan diplomasi untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Diplomasi dapat digunakan untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Oleh karena itu, diplomasi sering dianggap sebagai instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan bisnis mereka di tingkat internasional. Selain itu, diplomasi juga dapat digunakan untuk membentuk kerjasama dan menyelesaikan konflik antar negara. Diplomasi berperan penting dalam mengelola hubungan antar negara agar tetap stabil karena stabilitas hubungan akan membawa keuntungan bagi semua negara, khususnya di bidang kerjasama perdagangan internasional (Ebegbulem & Adams, 2022).

Sebagai instrumen penyelesaian konflik, Dyke (1973) membagi diplomasi menjadi 2 metode yang berbeda. Metode pertama yaitu penyelesaian konflik melalui pendekatan politis seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sedangkan metode kedua yaitu penyelesaian konflik melalui pendekatan yuridis seperti arbitrase dan adjudikasi. Perbedaan antara kedua metode tersebut dapat dilihat dari

sifat kesepakatan yang dihasilkan. Kesepakatan yang dihasilkan melalui pendekatan yuridis bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan kesepakatan yang dihasilkan melalui pendekatan politis lebih fleksibel dan tidak wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik (Ebegbulem & Adams, 2022).

Karin Aggestam dalam tulisannya yang berjudul “*Diplomatic Mediation*” membagi mediasi diplomatik kedalam 2 jenis yaitu “*pure mediation*” atau mediasi murni dan “*principal mediation*” atau mediasi utama. Mediasi murni lebih mengedepankan kemampuan mediator dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan mediasi utama lebih mengedepankan penggunaan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk mempengaruhi preferensi pihak-pihak yang berkonflik. Mediator dalam mediasi utama cenderung mengabaikan prinsip netralitas sehingga dianggap memiliki kepentingan, agenda, atau kedekatan hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Akan tetapi, mediasi utama tetap diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik karena mereka berharap bahwa mediator akan mempengaruhi proses negosiasi yang pada akhirnya akan menguntungkan mereka. Mediasi utama akan mengubah sistem “*zero-sum game*” antara 2 pihak menjadi “*win-win solution*” antara pihak-pihak yang berkonflik dan mediator. Mediasi utama biasanya dilakukan oleh negara-negara besar yang memiliki kepentingan di wilayah konflik. Sementara itu, mediasi murni biasanya dilakukan oleh negara-negara kecil dan organisasi internasional yang tidak memiliki kepentingan di wilayah konflik (Aggestam, 2016).

Diplomasi kuasi-mediiasi menurut Herbert C Kelman yaitu mediiasi dimana pihak ketiga membantu menyelesaikan konflik tetapi tidak melalui saluran formal. Diplomasi kuasi-mediiasi menurut Kelman lebih mengedepankan penggunaan intervensi informal untuk mendorong dialog dan saling pengertian antara pihak-pihak yang berkonflik. Gagasan Kelman tentang diplomasi kuasi-mediiasi kemudian dikembangkan oleh Sun dan Zoubir dalam tulisannya yang berjudul *“China’s Participation in Conflict Resolution in the Middle East and North Africa: A Case of Quasi-Mediation Diplomacy?”*. Dalam penelitian tersebut, Sun dan Zoubir menguraikan faktor pendorong dan tingkat diplomasi kuasi-mediiasi yang dilakukan Tiongkok di kawasan MENA. Terdapat 4 faktor pendorong Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediiasi yaitu adanya relevansi dengan kepentingan komersial, jangkauan pengaruh ekonomi dan politik terhadap pihak yang berkonflik, konsensus kekuatan besar, dan kesulitan penyelesaian konflik. Diplomasi kuasi-mediiasi yang dilakukan Tiongkok dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu intervensi multifaset, keterlibatan proaktif, interseksi terbatas, dan partisipasi tidak langsung (Sun & Zoubir, 2018).

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konsep

1.6.1.1. Kepentingan Komersial

Negara memutuskan untuk melakukan diplomasi kuasi-mediiasi apabila suatu konflik mengancam kepentingan komersialnya. Kepentingan komersial merupakan kepentingan inti yang bersifat nyata dan mendesak. Semakin besar kepentingan komersial yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan suatu

negara akan melakukan diplomasi kuasi-mediasi. Apabila kepentingan komersialnya terancam karena suatu konflik maka negara akan melakukan diplomasi kuasi-mediasi dengan memberikan sejumlah sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan konflik tersebut. Semakin banyak sumber daya yang diberikan oleh mediator maka semakin besar peluang tercapainya penyelesaian konflik. Hal ini karena mediator dengan motif yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan penyelesaian konflik dibandingkan dengan mediator dengan motif lemah (Sun & Zoubir, 2018).

1.6.1.2. Jangkauan Pengaruh

Negara memutuskan melakukan diplomasi kuasi-mediasi apabila memiliki sumber daya yang cukup untuk menekan atau mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik. Semakin besar pengaruh yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan suatu negara akan melakukan diplomasi kuasi-mediasi. Pengaruh yang dimaksud dapat berupa pengaruh ekonomi atau pengaruh politik. Pengaruh ekonomi dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan ekonomi seperti bantuan keuangan atau bantuan pembangunan. Pemberian bantuan ekonomi oleh mediator akan meningkatkan pengaruh politik yang dimilikinya terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Bantuan ekonomi yang diberikan oleh mediator merupakan imbalan atas kesediaan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengakhiri konflik. Peluang tercapainya penyelesaian konflik akan semakin besar apabila mediator bersedia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (Sun & Zoubir, 2018).

1.6.1.3. Kesulitan Penyelesaian Konflik

Negara tidak akan melakukan diplomasi kuasi-mediasi dalam konflik yang sulit diselesaikan untuk menghindari resiko kegagalan mediasi yang dapat mempengaruhi citranya di kancah internasional. Semakin sulit penyelesaian suatu konflik maka semakin kecil kemungkinan negara akan melakukan diplomasi kuasi-mediasi. Sebaliknya, semakin mudah penyelesaian suatu konflik maka semakin besar kemungkinan negara akan melakukan diplomasi kuasi-mediasi. Negara biasanya enggan memberikan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan konflik dengan tingkat kesulitan tinggi. Negara lebih memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan konflik-konflik yang cenderung mudah diselesaikan (Sun & Zoubir, 2018).

1.6.1.4. Interseksi Terbatas

Interseksi terbatas merupakan diplomasi kuasi-mediasi tingkat rendah dimana negara hanya ingin menandai kehadirannya dalam suatu konflik. Dalam tingkatan diplomasi kuasi-mediasi berada pada tingkat ketiga setelah intervensi multifaset dan keterlibatan proaktif. Mediator pada tingkat interseksi terbatas akan mengalokasikan sumber daya dalam jumlah yang kecil seperti mengirimkan pejabat tingkat rendah yang biasanya bersifat sementara dan simbolis. Pada tingkat interseksi terbatas negara hanya berpartisipasi secara terbatas dalam mediasi yang dipimpin oleh negara lain sehingga diplomasi kuasi-mediasi pada tingkat interseksi terbatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian konflik. Oleh karena itu, diplomasi kuasi-mediasi pada tingkat interseksi terbatas disebut juga sebagai diplomasi basa-basi (Wang, 2023).

1.6.1.5. Keterlibatan Proaktif

Keterlibatan proaktif merupakan diplomasi kuasi-mediasi tertinggi kedua dimana negara akan memberikan sumber daya yang lebih besar tetapi tidak sebesar pada tingkat intervensi multifaset. Pada tingkat keterlibatan proaktif mediator tidak menggunakan strategi ‘tongkat dan wortel’ sebagaimana yang digunakan pada tingkat intervensi multifaset. Mediator pada tingkat keterlibatan proaktif biasanya melibatkan pejabat tingkat tinggi, mengirimkan utusan khusus, atau memfasilitasi mediasi. Meskipun sumber daya yang diberikan tidak sebanyak pada tingkat intervensi multifaset tetapi mediator pada tingkat keterlibatan proaktif tetap mendorong terjadinya penyelesaian konflik (Wang, 2023).

1.6.2. Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1. Kepentingan Komersial

Konsep kepentingan komersial dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kepentingan komersial yang dimiliki Tiongkok di Arab Saudi dan Iran sehingga mendorong negara tersebut melakukan diplomasi kuasi-mediasi.

1.6.2.2. Jangkauan Pengaruh

Konsep jangkauan pengaruh dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh ekonomi dan politik yang dimiliki Tiongkok yang dapat digunakan untuk menekan atau mempengaruhi preferensi Arab Saudi dan Iran.

1.6.2.3. Kesulitan Penyelesaian Konflik

Konsep kesulitan penyelesaian konflik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesulitan penyelesaian konflik Arab Saudi dan Iran sehingga mendorong Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediasi dalam konflik tersebut.

1.6.2.4. Interseksi Terbatas

Konsep interseksi terbatas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tingkat diplomasi kuasi-mediasi yang dilakukan Tiongkok sebelum memfasilitasi mediasi antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023.

1.6.2.5. Keterlibatan Proaktif

Konsep keterlibatan proaktif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tingkat diplomasi kuasi-mediasi yang dilakukan Tiongkok setelah memfasilitasi mediasi antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediasi dalam konflik Arab Saudi dan Iran karena memiliki kepentingan komersial yang tinggi, jangkauan pengaruh ekonomi dan politik yang sedang, serta kesulitan penyelesaian konflik yang sedang. Selain itu, penelitian ini berargumen bahwa diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran mengalami peningkatan dari interseksi terbatas menjadi keterlibatan proaktif. Tiongkok awalnya hanya melakukan “*shuttle diplomacy*” melalui kunjungan pejabat tingkat rendah sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penyelesaian konflik Arab Saudi dan Iran. Akan tetapi, pada tahun 2023 Tiongkok bersedia menjadi tuan rumah dan memfasilitasi mediasi antara Arab Saudi dan Iran sehingga menghasilkan pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara.

1.8. Metode Penelitian

Miller (1997) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dikonstruksikan dan hubungan sosial yang terjalin antar entitas. Strauss dan Corbin (2004) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dihasilkan dari hitung-hitungan atau prosedur statistik. Rianto (2020) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara lebih mendalam. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena berusaha menganalisis fenomena diplomasi kuasi-mediasi yang dilakukan Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran secara lebih mendalam.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif-eksplanatif. Penulis akan memberikan penjelasan mengapa Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediasi dalam konflik Arab Saudi dan Iran serta bagaimana tingkat diplomasi kuasi-mediasi Tiongkok dalam konflik tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti melihat keadaan sebenarnya dari subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sehingga situs penelitian dari penelitian ini yaitu Tiongkok, Arab Saudi, dan Iran.

1.8.3. Subjek Penelitian

Abdussamad (2021) mendefinisikan subjek penelitian sebagai entitas yang dapat mempengaruhi keseluruhan penelitian mulai dari jenis data, sumber data,

teknik pengumpulan data, serta analisis dan interpretasi data sehingga subjek penelitian dari penelitian ini yaitu Tiongkok, Arab Saudi, dan Iran.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif seperti teks, narasi, gambar, grafik, diagram, atau tabel yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan deskriptif-eksplanatif mengenai diplomasi kuasi-mediasi yang dilakukan Tiongkok dalam konflik Arab Saudi dan Iran.

1.8.5. Sumber Data

Abdussamad (2021) membagi sumber data menjadi 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara atau publikasi resmi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara seperti buku, jurnal, website, atau artikel online. Penelitian ini disusun menggunakan data primer yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah Tiongkok dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, website, dan artikel online yang bersifat kredibel.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *desk research* yang terdiri dari *library research* dan *internet research*. *Library research* merupakan penelusuran informasi di perpustakaan atau database elektronik. Sedangkan *internet research* merupakan penelusuran informasi melalui sumber-sumber online seperti jurnal, website, artikel online, dan lain sebagainya.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dimana penulis memberikan penjelasan mengenai faktor pendorong Tiongkok melakukan diplomasi kuasi-mediasi dalam konflik Arab Saudi dan Iran serta menganalisis tingkat diplomasi kuasi-mediasi yang dilakukan Tiongkok dalam konflik tersebut.

1.8.8. Kualitas Data

Saat ini penelitian yang membahas diplomasi kuasi-mediasi masih jarang ditemukan sehingga penelitian ini bermanfaat untuk menambah kekayaan literatur, khususnya di bidang diplomasi dan resolusi konflik. Selain itu, penelitian ini disusun menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber kredibel sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan data.